

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

**untuk memenuhi sebagian Persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

Subandi

E 121 08 264

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

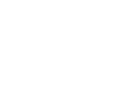
**Subandi
E 121 08 264**

telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari kamis, 29 Agustus 2013

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H.A. Gau kadir, M.A.	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si.	()
Anggota	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.	()
Anggota	: Drs. A.M. Rusli, M.Si.	()
Anggota	: A. Murfhi, S.Sos, M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. H.A. Gau Kadir, M.A.	()
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.	()

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Subandi

E 121 08 264

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 29 Agustus 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh:

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H.A. Gau Kadir, M.A.
NIP. 19501017 198003 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.
NIP. 19601123 198603 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H.A. Gau Kadir, M.A.
NIP. 19501017 198003 1 002

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puja dan puji serta rasa syukur alhamdulillah yang tak henti-hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT sang pemilik semesta alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan karena berkat-Nyalah sehingga skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar”** ini bisa terselesaikan meskipun dengan segala keterbatasan, tak lupa juga shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan contoh keteladanan dan kegigihannya kepada setiap hambanya dalam mengarungi setiap bahtera kehidupan dunia ini.

Penulis sangat menyadari bahwasanya di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana karya tulis ilmiah lainnya, baik dari segi teknik penulisan, kurangnya literature ataupun referensi serta dari segi isinya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan pengetahuan terbatas penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran yang membangun demi penyempurnaan sebuah hasil karya tulis ilmiah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan ini telah banyak melibatkan pihak-pihak yang senantiasa membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

serta untaian doa yang semoga selalu tercurahkan oleh sang khalik kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibunda Misi yang telah memberikan setengah dari hidupnya untuk merawat dan membesarkanku dengan seluruh cinta dan kasih sayangnya, yang dalam setiap sujudnya tak pernah lupa mendoakan ananda. Ayahanda Suparjo yang senantiasa memberikan nasehat, kasih sayang serta cucuran keringat dan pengorbanannya, terima kasih atas pelajaran dan nilai-nilai kehidupan yang selama ini ayahanda ajarkan dalam setiap ruang-ruang yang ada. Maafkan jikalau ananda selama ini sering menyusahkan, merepotkan dan melukai perasaan ibunda dan ayahanda, sungguh sampai kapanpun ananda tidak akan pernah bisa membalas semuanya. Semoga Allah SWT selalu menyapamu dengan cintanya di setiap nafas kehidupan ini dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Aamiin ya rabbal aalamiin.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp. BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

5. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus M.Si selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang senantiasa meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf pegawai di dalam lingkup FISIP UNHAS khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing, mendidik dan memberikan pengetahuan serta nasehat-nasehat kepada penulis.
7. Dinas Pendidikan Kota Makassar, khususnya Bapak Drs. Mahmud BM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Ismunandar selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah serta Ibu Ernawati selaku Kepala Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam membantu penulis melaksanakan penelitian.
8. Bapak Drs. Fatahuddin selaku Kepala Sekolah SMAN 21 Makassar, Bapak Drs. Abd. Kadir, MPd selaku Wakasek SMAN 5 Makassar dan Bapak Drs. Jaharuddin selaku Wakasek SMAN 11 Makassar, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam meladeni pertanyaan-pertanyaan dari penulis.
9. Kepada Saudara-saudariku Saoda A.md, Saudi (Alm), Sauma (Almh) dan Ajirah terima kasih banyak telah mewarnai setiap bingkai kehidupan yang telah kalian rajut dalam setiap memori

kenangan indah yang selalu akan menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis kini dan selamanya. Dan tak lupa doa disetiap sujudku akan terus mengiringi dan menghiasi tempat kalian berdua di alam sana. Semoga kalian diberikan tempat yang layak di sisi-Nya Aamiin.

10. Saudara-saudari penulis Mahasiswa Ilmu pemerintahan Glasnost 08' teman-teman seperjuangan ***“satu generasi, satu perjuangan”*** Laode. Muh. Amin, Anjar Zakaruddin, Muh. “Bimbim” Ansari, Agusman “Umman” Hidayat, Asrul “Olle” Nurdin, Ermitha Savitry, Nurlaila, Fahri Rezky Rahman, Ahwandy Hasyim, Erlangga DP, Aswardi, Muh. Reza “Echa” Pratama, Edi Wahyu, Sufriyadi “Uphy”, A. “Kirah” Muzkirah, Zahra AR, Asrul Prayudha “Accul” Imran, Abdul Gafur Mogana, Kasmirah “Rhara”, Kukuh Erlangga, Firman Udding, Azmanirah “Chaca” M, Avrina Dwijayanti “Avri”, Reskianto “Eki” Taulabi Kia, Dedy Irawan, Muh. Farid, Reksa Burhan, Muh. Nurhidayat “Dayat”, Alfryady Edo, Bu Ketua Angkatan Anita Nurak, Satriah, Muh. Agus, Akmaluddin “Akemal” Haswin, Arianitalia “Aya” Anwar, Rini Indriani, Febrina “Bulat” Fonna, Aan Saddam Husain “Bapaknya Afika”, Miskat Agussalim, Haswan, Indah Iswary Johor, Melisa “Icha” Fitrah, Istiana “Tyana” Aminuddin, Hijrah Kherana, Silvanty “UmmySilva” Sangadji, Ashabul Eka Putra, A. Muh. Akram, A. Muh. Lutfi, Yuniar “Emi” Eka Rahmi, Fitriani “Fitto” HR, Hidayatul “Yayat” Mursyidin, A. Ardiana “Dina” Islamia P, Desi Indriani Pertiwi,

Ayu Khaira, Zaenal “Enal” Akhmad, Herwin Gunawan, Ashar Prawitno, Sukriyadi “Uki” Syamri, Nurhidayah “Yhaya” Ibbas, Evi Miselvy, Indrawaty, Muh. Septian Budiato, Muh. Rizal. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, takkan ada yang terlewatkan semua akan menjadi cerita indah dan tak lekang oleh zaman. ***Never ending story***

11. Untuk keluarga kecilku di Bumi Orange HIMAPEM FISIP UNHAS, Konstitusi 03, Kybernology 04, Revolusioner 05, Rezpabilca 06, Renaissance 07, Aufklarung 09, Volksgeist 10, Enlightenment 11 dan Fraternity 12 terima kasih karena mau membagi kebersamaannya selama ini.

12. Untuk Pimpinan Beastudi Etos terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari “keluarga” ini dan Segenap kanda-kanda dari Beastudi Etos Makassar yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan serta pembinaan terhadap penulis kepada Kanda Anwar ST selaku Korwil pada saat itu, Kanda Misbahuddin Azis S. Kep yang telah bersedia mengabdikan diri menjadi pembimbing saya dan teman-teman yang tergabung dalam penerima Beastudi Etos 2008 ada Hamzah SP, Muhtar SH, Alfryady S.IP, Gunawan Hamka ST, Muh. Ayyub S.KM, La Inta S.Hut, Muh. Ruslan SE, Anggraini SE, Asia Arifin SP, Isman Sandira S.Ked, Abd. Rahman SP, Sulfikar SP, Dewi Permatasari, Jaya Hidayat, Ruslin Amir, Supriadi, Muh.

Arsyad, Dahlan Bahar, Agussalim dan Jasmani yang Insya Allah akan segera menyusul di Baruga, terima kasih atas persaudaraan dan kebersamannya selama ini. ***“Kami belajar memaknai hidup bukan menikmati hidup”, one for all all for one.***

13. Teman-teman KKN Gelombang 80 Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar ada Pak Korcam Kanda Ihsan “Iccang” S.Pt, Sekcam Abd. “Adi” Kadir SH, Bencam Laura “Lola” Septiane SE, Sekdes Efraim Sugainto, Bendes Bunda Sukma Juwati Tajuddin SE, Dian Juwairiah “Dj” ST, A. Ade “Abot” Aulia ST, Fathlina “Pupunk” S.Ked, dan Jusriany “Urhy” S.s terima kasih semua.

14. Teman-teman LBK (Laskar Biru Kuning) yang telah menemani menjelajah setiap sudut koridor kampus terima kasih atas semuanya. ***Dialektika Perlawanan Anak Zaman*** (Mimbar 2008)

15. Bapak H. Wahab SE beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis dan menasehati layaknya orang tua sendiri dengan ini kuhaturkan banyak terima kasih atas apa yang saya dapat selama ini. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati bapak diganjar pahala yang setimpal dari sang khalik Aamiin.

16. Segenap keluarga kecilku dari Pondok Hasanuddin, Angkasa media, Angkasa elektronik dan Alfarizi minishop yang selama ini telah menjadi warna tersendiri dalam setiap sudut kehidupan penulis. Buat mas Andi yang telah bersedia menjadi teman diskusi

penulis kapanpun, dimanapun terima kasih atas segala bantuan dan masukannya selain itu untuk adik-adikku Sulaiman, Hamdi, Said, Gery, Rizal, Iwan, Acha, Rasti, Emi, Rini, Adilla, Rusna, Nisma, Haje 01 dan Haje 02 yang terkadang membuat penulis jengkel dan membuat suasana gaduh bercampur emosi dan tak jarang pula membuat penulis tersenyum semoga ini menjadi pengalaman dan cerita yang tak lekang oleh waktu dan tak terhapus oleh zaman, dan nama yang terakhir ini ingin dibedakan dari yang lain terkhusus untuk adik Hasrina alias inha alias *Indo' ballo* alias Ibu kost, alias ade cantik bede' alias ade waper (wanita perkasa) alias chef musiman alias pengusaha travel yang menjabat semi bos yang menurut penulis adik yang serba bisa alias *multi talent* dan pekerja keras sungguh panutan yang baik bagi adik-adiknya. Terima kasih karena bersedia menjadi pendengar yang baik tatkala penulis berkeluh kesah sungguh sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan sampai kapanpun. ***Thank's for everything***

17. Permohonan maafku atas segala keterbatasan ini kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang tanpa mereka skripsi ini takkan selsesai, tak lupa kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan doanya untuk penulis.

Teristimewa buat seorang adik berinisial I.W.S yang telah hadir dan ikut mewarnai bingkai kisah cerita hidup penulis sungguh kehadiranmu merupakan “bingkisan tuhan” bagi penulis. Meskipun segala sesuatunya belum pasti, namun penulis percaya bahwa terkadang cinta memang sulit, tetapi harus ditaklukkan, jangan bertanya mengapa, kelak kita akan tahu dan mengerti betapa hidup ini memerlukan kata cinta.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf dari hati yang terdalam jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat menjadi nilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 29 September 2013

Penulis

ABSTRAKSI

Subandi, Nomor Pokok E12108264, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan judul Skripsi “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar**”, dibawah bimbingan Dr.H.A. Gau Kadir M.A dan Dr.Hj. Rabina Yunus, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan menengah atas serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kepada subjek penelitian dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. serta ditunjang dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian yang tentunya berhubungan langsung dengan topik penelitian ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan menengah atas sangatlah dibutuhkan peran serta dari pemerintah dan kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terkait baik itu dari Pemerintah Kota Makassar sendiri, dari pihak Dinas Pendidikan Kota, dan dari pihak sekolah maupun dari kalangan masyarakat agar apa yang menjadi cita-cita bangsa serta tujuan bersama bisa terwujud. Untuk menunjang peran pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah maka diadakan memberikan pelatihan untuk guru maupun tenaga pengajar, pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan bantuan bagi siswa yang kurang mampu, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta mutu kurikulum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah terbagi atas dua yaitu faktor pendukung seperti respon guru yang cukup baik, membantu meningkatkan minat belajar siswa, adapun faktor penghambatnya seperti kualitas guru yang belum memadai, kurangnya koordinasi yang terjalin serta pendanaan yang terbatas.

ABSTRACTION

Subandi, basic number E12108264, Science of Government, Departemen of Politic and Government, Faculty of science social and politic Hasanuddin University. With skripsi title **“Character of Region Government in Implementation Education in Makassar”**. Under guidance are Dr.H.A. Gau Kadir M.A and Dr.Hj.Rabina yunus,M.si.

Purpose from this research is to know how long character from Makassar Government in implementation education specifically for on top of middle education and to know influence factors character of Makassar Government in implementation on top of middle education.

The type research is descriptive with technical data colleting with observation, that is research was with monitoring to subject research and deepen interview with use directive interview where researcher arrange question answer with some informant interrelated with this research. And with primary data and secondary from during research certainly related with research topic.

Result from research indicate that deep implementation on top middle education very need character from Government and good cooperation between interrelated side party are Makassar Government, Education Departement, schools although from society community in order to what nation want and our purpose can be realize. For help character Makassar Government in implementation middle education then perpetrate extend training for teacher and instructor teacher, bestowal scholarship fellowship for achievement and assistance for student who poor, provisioning medium tool and infrastructure education and curriculum quality. Factors influence character of Government in implementation middle education divisible be two facto, there are supporter factor as good response from teacher, can help upgrade learn interest from student, and obstacle factor as teacher quality is not suffice, bad coordination and limited funding financing.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI.....	xii
ABSTRACTION.....	xii
i	
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR	
GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan penelitian	9
1.4. Manfaat penelitian.....	10
1.5. Metode penelitian	10
1.5.1. Lokasi penelitian	10
1.5.2. Informan	11

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.4. Defenisi Operasional..	13
1.5.5. Skema Kerangka Konseptual	15
1.5.6. Teknik Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Peran.....	18
2.1.1. Pengertian Peran.....	18
2.2. Tinjauan Tentang Pemerintah.....	21
2.3. Tinjauan Tentang Pendidikan.....	25
2.4. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	38
3.1.1. Letak Geografis.....	39
3.2. Penduduk.....	43
3.3. Visi dan Misi Kota Makassar.....	48
3.3.1. Visi Kota Makassar.....	48
3.3.2. Misi Kota Makassar.....	50
3.4. Pendidikan.....	51
3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	51
3.4.2. Pendidikan Umum.....	52
3.5. Kondisi Sosial Budaya Makassar.....	53

3.5.1. Suku Etnis.....	53
3.5.2. Kesejahteraan.....	54
3.6. Keagamaan.....	57
3.7. Ekonomi dan Keuangan.....	58
3.7.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	59
3.8. Aparatur Pemerintahan.....	59
3.9. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar.....	78
4.1.1 Lingkungan Internal.....	81
4.1.2. Lingkungan Eksternal.....	85
4.1.3. Faktor Kunci Keberhasilan.....	86
4.1.4. Asumsi.....	87
4.2. Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.....	88
4.2.1. Pelatihan untuk Guru.....	94
4.2.2. Pemberian Bantuan Beasiswa.....	99
4.2.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	101
4.2.4. Mutu Kurikulum.....	105

4.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Kota Makassar	108
4.3.1.Faktor Pendukung	109
4.3.1.1. Respon Guru.....	109
4.3.1.2. Minat Belajar Siswa.....	111
4.3.2. Faktor Penghambat	113
4.3.2.1. Kualitas Guru Belum Memadai.....	113
4.3.2.2. Kurangnya Koordinasi.....	114
4.3.2.3. Pendanaan Terbatas.....	116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar	40
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Presentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	41
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2008-2009	43
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Rasio Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2009	45
Tabel 3.5	Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2009	46
Tabel 3.6	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Menurut Rincian Kecamatan di Kota Makassar	54
Tabel 3.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan yang Bertugas Pada Lingkup Kota Makassar Tahun 2009.....	59
Tabel 3.8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon yang Bertugas Pada Lingkup Kota Makassar Tahun 2009.....	61

DAFTAR GRAFIK

Tabel 3.1 Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Menurut Rincian Kecamatan di Kota Makassar	55
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan yang Bertugas Pada Lingkup Kota Makassar Tahun 2007-2009...	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5.5 Skema Kerangka Konseptual.....	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah perang dunia kedua berakhir, hampir semua negara di dunia dihadapkan dengan masalah permintaan akan pendidikan yang terus meningkat. Coombs (1968) mengemukakan tiga hal yang menjadi penyebab utama meningkatnya permintaan ini. Pertama, meningkatnya gairah pendidikan dari para orang tua dan anak. Kedua, adanya kesadaran dari pemimpin bahwa pendidikan merupakan prasyarat dalam semua sektor pembangunan. Ketiga, ledakan penduduk yang berarti membesarnya populasi anak usia sekolah. Sejarah menunjukkan bahwa manusia, bukan alam yang menjadi sumber utama pembangunan. Faktor penentu dari semua pertumbuhan ekonomi berasal dari pemikiran manusia. Manusia pemikir ini dibentuk melalui pendidikan. Itulah sebabnya, maka kita dapat mengatakan bahwa pendidikan adalah yang paling vital dari semua sumber daya (Schumacher, 1973).

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan pada saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia

berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Sudah sewajarnya, pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan, maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan Negara Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya di dalam pasal 31 UUD 1945 dicantumkan bahwa: (1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran; (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa masalah pokok yang telah diidentifikasi sebagai masalah kuantitas, kualitas dan relevansi (Thayeb,1976). Masalah kuantitas menyangkut usaha penambahan sekolah di hampir semua jenjang pendidikan serta usaha penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kesempatan mendapatkan pendidikan dapat merata. Masalah kualitas pendidikan menyangkut usaha meningkatkan proses belajar mengajar agar keluaran suatu lembaga pendidikan memiliki

kemampuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan lembaga pendidikan tersebut.

Masalah relevansi pendidikan menyangkut kesesuaian kemampuan keluaran lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Ketiga masalah pendidikan tersebut saling kait-mengait sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Meningkatkan kualitas pendidikan akan menyangkut antara lain, persediaan tenaga pengajar yang jika diabaikan, jelas akan menurunkan kualitas keluaran. Meningkatkan atau mempertahankan kualitas dengan mengabaikan aspek kuantitas akan dihadapkan dengan tuntutan untuk mendapatkan pendidikan dari populasi anak usia sekolah yang terus membesar. Masalah relevansi jelas menyangkut juga aspek kuantitas dan kualitas. Pembangunan membutuhkan bermacam-macam tenaga ahli dan terampil dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tahap-tahap pembangunan itu.

Dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka dapat dilihat kualitasnya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya memiliki tujuan utama untuk menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menghasilkan lulusan yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pemerintah harus benar-benar menuangkan amanat UUD 1945 kedalam langkah yang lebih konkrit, karena di zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan, pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan politik. Pemerintah ataupun Negara sebagai akibatnya tidak saja secara murni menyelesaikan persoalan yang terkait dengan proses belajar mengajar, melainkan juga yang lebih rumit adalah dihadapkan oleh persoalan yang terkait dengan bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan itu.

Landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah UUD 45 pasal 31 Tentang Pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdinkas) dan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan pada pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Kedua ayat ini memberikan tugas kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan beserta sarannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pemerintah berkewajiban membiayai segala pengeluaran yang diperlukan untuk memfasilitasi tertunainya pendidikan dasar bagi setiap warga Negara. Anggaran yang disediakan cukup besar, yaitu minimal 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana ditegaskan dalam ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Jika kita membicarakan bagaimana kemudian peranan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, yang mana dapat dijadikan sebagai instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di daerah, maka persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan selain merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas dan harkat manusia juga sebagai tolok ukur martabat suatu bangsa. Tolok ukur kualitas suatu bangsa ini, dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pendidikan itu berlangsung dalam sebuah Negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu Negara, maka semakin tinggi pula kualitas masyarakat bangsanya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Hal ini pun bermula dengan dilahirkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang juga melahirkan konsekuensi otonomi dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang sebelumnya diatur secara terpusat diubah dengan pendekatan desentralistik. kewenangan manajemen pendidikan dialihkan dari pusat ke daerah dengan sekolah sebagai ujung tombaknya.

Maka pemerintah Kota Makassar sesuai kewenangan yang diembannya telah membentuk Dinas Pendidikan Kota Makassar sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2009 sebagai penyelenggara dan penanggungjawab operasional pendidikan dengan tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Kota Makassar.

Dengan demikian Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional yang dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk menyelenggarakan suatu pendidikan dan menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan saat ini yang bersifat global, mau tidak mau harus mendapat perhatian utama, sebab kalau tidak, maka masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam pergaulan dunia. Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dilihat dari indikator ekonomi, ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya, bukan ditentukan oleh kekayaan sumber alam. Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan, yang juga harus bermutu tinggi.

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini muncul banyak kritikan baik dari praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan mengenai pendidikan nasional yang tidak mempunyai arah yang jelas. Dunia pendidikan sekarang ini bukan merupakan pemersatu bangsa tetapi merupakan suatu ajang pertikaian dan persemaian manusia-manusia yang berdiri sendiri dalam arti yang sempit, mementingkan diri dan

kelompok. Maka dari itu perlu kiranya pemerintah kota Makassar memperhatikan tentang kualitas pendidikan dan upaya-upaya penyelenggaraannya guna peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sebenarnya banyak sekali faktor yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal yang mana berpengaruh pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang pada pangkalnya berpengaruh dalam proses penyelenggaraannya. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya.

Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi segala permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya. Terlebih lagi, hal ini telah menjadi tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas para guru dan membentuk mutu lulusan yang handal para siswa yang bersangkutan maupun sekolah tersebut. Dengan demikian apa yang telah digariskan dalam GBHN bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah

dapat menjadi kenyataan, karena pendidikan adalah hal esensial yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa tanpa terkecuali, Olehnya itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis kemudia tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan anak sekolah menengah atas ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak sekolah menengah atas di kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan anak sekolah menengah atas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak sekolah menengah atas di kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian lanjutan untuk peneliti yang lain dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat Pragmatis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya pemerintah kota Makassar dalam melihat realitas dunia pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan anak sekolah menengah atas.
3. Manfaat Metodologis, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat menjadi sebuah referensi dan dorongan moril dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan yang serupa tentunya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah administratif Kota Makassar. Dalam hal ini berfokus pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan tiga sekolah yang masing-masing mewakili wilayahnya.

Adapun nama-nama sekolah yang menjadi sampel penelitian adalah:

1. SMAN 21 Makassar

2. SMAN 5 Makassar

3. SMAN 11 Makassar

Alasan peneliti mengambil tiga sekolah ini dikarenakan masing-masing mewakili dari setiap status wilayah di Kota Makassar dengan formasi wilayah Pinggir Kota, Tengah Kota dan Pusat Kota.

1.5.2 Informan

Informan merupakan pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian (Abdullah;2003). Informan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas di kalangan pejabat pemerintah daerah tetapi juga kalangan di luar unsur pemerintah daerah (masyarakat umum).

Adapun informan yang diyakini akan dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Pendidikan
- b. Sekretaris Dinas Pendidikan
- c. Kepala Bidang Pendidikan Menengah
- d. Kepala Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah
- e. Kepala Sekolah SMAN 21 Makassar
- f. Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar
- g. Kepala Sekolah SMAN 11 Makassar
- h. Pemerhati Pendidikan

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui :
 - a. Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti
 - b. Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang dimaksud, dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Data Sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui :
 - a. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1.5.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka definisi operasional yang dikemukakan sebagai upaya untuk menerjemahkan konsep dari masalah/tujuan penelitian ke dalam “bahasa penelitian”

sedemikian rupa dalam bentuk yang lebih konkret sehingga relatif lebih mudah diteliti dan datanya dapat dikumpulkan maka dalam penelitian ini yang dimaksud adalah:

- a) Peran yang di maksudkan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah , dalam hal ini pendidikan anak sekolah menengah atas.
- b) Pemerintah yang dimaksud disini adalah Pemerintah Daerah Administratif Kota Makassar beserta dengan perangkat penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam UU no.19 tahun 2003 serta produk hukum lain yang menaunginya penulis menempatkan pemerintah daerah Kota Makassar sebagai pemegang amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku secara nasional untuk di implementasikan di daerah sesuai dengan fungsi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang dalam UU tersebut pasal (11) ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi”.
- c) Pendidikan yang di maksud di sini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.

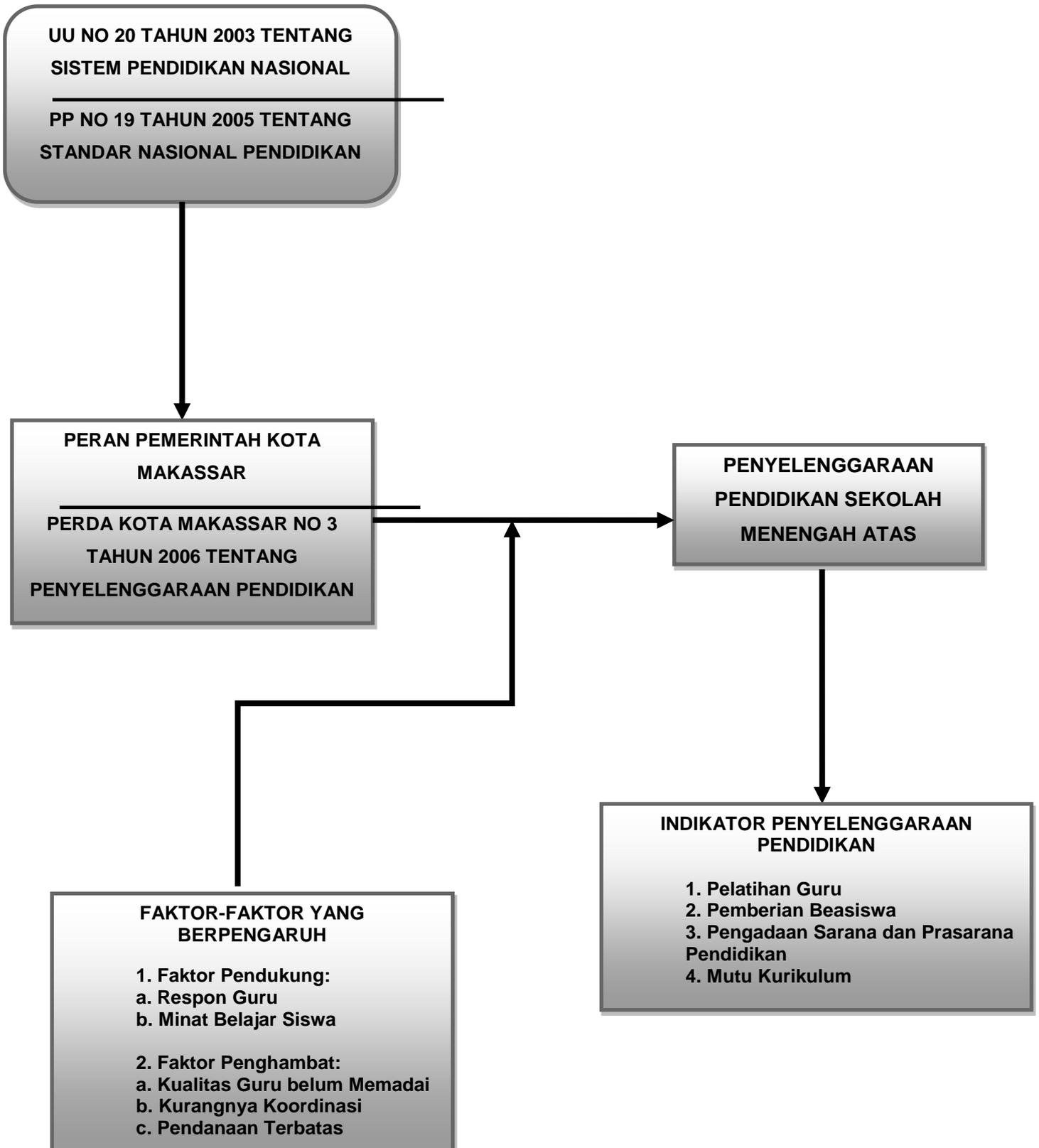
20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

d) Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. adapun yang menjadi indikator peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan guru
- 2) Pemberian beasiswa
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
- 4) Mutu kurikulum

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pendidikan yaitu faktor yang mendukung seperti Respon guru dan Minat belajar siswa adapun faktor yang menghambatnya seperti Kualitas guru yang belum memadai, Kurangnya koordinasi dan Pendanaan yang terbatas

1.5.5 Skema Kerangka Konseptual



Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (1992), diterapkan melalui 3 (tiga) alur sebagai berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian padapenyederhanaan, pengabstrakan dan, transformasi data kasar yangdiperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.

2) Penyajian data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, tabel, dan, bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya, dan kecocokannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut:

“Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan.”

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

Menurut Selo Sumarjono, peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kehidupan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Sedangkan menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa peranan adalah 1) aspek dinamis dari kedudukan, 2) perangkat hak-hak dan kewajiban, 3) perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan 4) bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang. Sedangkan Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (*role set*) digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok.

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya

Sedangkan menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya;
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran di antaranya sebagai berikut:

- a. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi perilaku struktur social.

2.2 Tinjauan Tentang Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pemerintah adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara atau bagian negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu negara seperti kabinet dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu juga, definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikianlah salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndhara,1999:7).

Dalam kaitan itu, istilah pemerintah menurut Finer dalam Kuper (2000:418) setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan di mana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Sering kali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung di mana pemerintah tersebut berada. Ketiga, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Semua jabatan-jabatan pemerintah yang diisi oleh orang yang dipilih (*public elected system*) maupun diangkat (*political appointed*). Keempat, istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintah oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper,2000:419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauhmana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga Negara bagi upaya mencapai tujuan. Selanjutnya kejelasan mengenai defenisi pemerintah, lebih jauh dapat kita cermati dalam beberapa penjelasan dibawah ini.

Dalam pandangan lain mengatakan bahwa pemerintah adalah “segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraaan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara” (Ndraha, 1997:1). Apapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Hal itu diungkapkan oleh Rasyid (1997:11) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani masyarakat, menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk mengemban tugas Negara tersebut, menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu, fungsi sekunder, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan

untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

Lain halnya lagi menurut Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, di mana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

2.3 Tinjauan Tentang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran serta yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan pembangunan berbangsa dan bernegara, tetapi sebelumnya kita akan menguraikan tentang apa sebenarnya maksud dari istilah pendidikan itu sendiri. Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terdapat dua istilah yang sama bentuk dan paling sering digunakan dalam dunia pendidikan yang mana secara umum Pendidikan berasal dari kata pedagogi (*paedagogie*, Bahasa Latin) yang berarti

pendidikan dan kata pedagogia (*paedagogiek*) yang berarti ilmu pendidikan (Purwanto dalam Sukarjo,2009:7) yang berasal dari bahasa Yunani. *Pedagogia* terdiri dari dua kata yaitu 'Paedos' (anak) dan 'Agoge' yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Sedangkan *paedagogos* ialah seorang pelayan atau bujang (pemuda) pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa) ke dan dari sekolah. Perkataan *paedagogos* yang semula berkonotasi rendah (pelayan, pembantu) ini, kemudian sekarang dipakai untuk nama pekerjaan yang mulia yakni *paedagogos* (pendidik atau ahli didik atau guru).

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat".

Menurut Ahmadi (2001:70) pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.

Branata (1988) mengungkapkan bahwa Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987:11) yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Dari sudut pandang ini pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai "ilmu dan seni mengajar anak "*(the art and science of teaching children)*.

Pengertian Pendidikan Menurut M.J. Langeveld adalah upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan (Kartono,1997:11). Sementara itu, Marimba merumuskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama (Nata, 2001:1).

Pengertian pendidikan yang mengacu pada konsep psikologi pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Crow (dalam Supriyatno, 2001) bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk

mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam pengalaman-pengalaman dan belajar. Pendidikan merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sikapnya (Thompson, 1993:67). Penjelasan dari Thompson ini merupakan pengertian pendidikan dalam arti luas.

Pendapat lain tentang pendidikan menurut Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa :

"pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya".

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudirman W (1987:17) bahwa: "Pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental”. Dari pengertian tersebut tersirat bahwa manusia yang mengalami proses pendidikan akan mengalami perubahan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang termanifestasikan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Menurut Adam Smith pendidikan adalah *Human Investment*, maksudnya karena manusia merupakan modal yang mempunyai sikap dan keterampilan maka harus ditingkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan. Sedangkan pendidikan menurut Yayat Achdiat (2002:16) adalah suatu proses untuk mengembangkan pengetahuan, kecerdasan, sikap, karakter dan skill khususnya dalam pendidikan formal.

Pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di lingkungan masyarakat dimana ia berada. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (contoh paling nyata sekolah) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal (*Dictionary of Education* dalam T. Sulistyono, 2003).

Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, melihat dari [sudut pandang psikologis](#), dan yang kedua dari **sudut pandang sosiologis**. Banyak sudut pandang untuk dapat merumuskan [pengertian pendidikan](#) sehingga banyak juga definisi tentang pendidikan. Namun demikian, yang

jelas bahwa [pendidikan](#) adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat *survive* dalam menjalani hidupnya. Selain itu dapat kita lihat bahwa dari pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa proses pendidikan merupakan kombinasi atau perpaduan antara konsep teoritis dan konsep praktis guna mencapai kepribadian yang matang melalui proses interaksi pembelajaran antara pendidikan dan yang di didik yang dirancang secara sistematis.

2.4 Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.

Landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah UUD 45 Pasal 31 tentang Pendidikan, UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. UUD 45 menjamin hak pendidikan rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 Ayat 1: "Setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan” dan Ayat 2: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Kedua ayat ini memberikan tugas kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan beserta sarananya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berkewajiban membiayai segala pengeluaran yang diperlukan untuk memfasilitasi tertunainya pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Anggaran yang disediakan cukup besar, yaitu minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana ditegaskan dalam Ayat 4: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ada 3 (tiga) petunjuk yang diperoleh oleh keempat ayat di atas, yaitu: (1) pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara; (2) pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan dasar; dan (3) tujuan pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia. Berdasarkan ketiga petunjuk ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlaq mulia dengan biaya sepenuhnya ditanggung negara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” Pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 memperjelas bahwa anggaran penyelenggaraan Pendidikan Nasional minimal sebesar 20 % diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu ada juga beberapa sudut pandang yang melandasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Penyelenggaraan pendidikan dilihat dari konstitusi

Penyelenggaraan pendidikan dilihat dari konstitusi dapat ditemukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” Untuk mempertegas hal ini, UUD 1945 Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 31 Ayat 1 berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”

Jika kita lihat dilapangan, sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya mengenyam bangku pendidikan bahkan pendidikan dasar apa lagi akses perguruan tinggi (Siti Julaeha & Atwi Suparman). Padahal konstitusi telah mengamanatkan hal ini dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi : *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”* kewajiban pembiayaan ini dipertegas kembali oleh konstitusi dalam ayat 4 yang berbunyi : *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”* Padahal Target MDG adalah menjamin bahwa sampai dengan 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar.

2. Penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sumbangannya

Penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sumbangannya, yaitu

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Karena pendidikan memainkan peranan dalam membentuk pola pikir seseorang dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang ditemuinya.

2. Investasi jangka panjang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perekonomian bangsa. Tanpa sumber daya manusia yang memiliki produktifitas yang tinggi maka dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami kehancuran. Melalui sumber daya manusia yang baik (memiliki produktifitas yang tinggi) maka perekonomian yang terus bertumbuh akan tercipta dan berujung pada kemajuan yang diperoleh negara tersebut. Karena sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu kemajuan suatu bangsa dan negara. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan yang merata dikatakan juga sebagai investasi jangka panjang (Nina Toyamah dan Syaikhul Usman) yang akan dibutuhkan bagi perkembangan perekonomian ke depan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" Pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 memperjelas bahwa anggaran penyelenggaraan Pendidikan Nasional minimal sebesar 20 % diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita sebagai bangsa Indonesia yang konsisten dengan Pendidikan Nasional menyikapi berbagai kasus yang ada secara bijaksana.

Jikalau kita berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan tentunya ada beberapa hal yang melandasinya, hal ini pun telah dijelaskan sebagaimana yang telah dicantumkan sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada enam prinsip yang mana ketentuan ini diatur pada Bab II Pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat berikut isi dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 4 yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Selain itu dijelaskan pula dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan luaran yang mampu untuk:

1. Menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka dan modern.

2. Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan agama, budaya, suku dan bangsa.

3. Terus menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri.

4. Mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

5. Menghadapi dan unggul dalam persaingan regional, nasional dan global.

6. Mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah revitalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kontinuitas, kemandirian,